BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan Insperktorat kota Bandung dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung

4.1.1.1 Sejarah singkat Inspektorat kota Bandung

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tidak terlepas dari peran aparatur pemerintah pada saat melaksanakan tugas dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membantu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

Instansi pengawasan dan pemeriksaan intern yang dilakukan pada pemerintah kota Bandung dilakukan oleh inspektorat kota Bandung mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

3. Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional tahun 2000-2005;
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nmr 31 thn 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. Keputusan presiden nomor 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahn daerah;
6. Keputusan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2001 tentang pengawasan repressif kebijakan daerah;
7. Keputusan walikota bandung 989 tahun 2002 tentang pedoman operasional pengawasan;
8. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
9. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah di daerah;
10. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

1. Visi inspektorat kota bandung adalah

   "terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bermartabat melalui pengawasan yang profesional dan bertanggungjawab".

2. Misi inspektorat kota bandung adalah
   a. Melakukan pengawasan terhadap sistem, mekanisme, peraturan yang telah ditetapkan
   b. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik melalui pengawasan internal/ fungsional;

c. Mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien serta responsif;
d. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam pengambilan keputusan pimpinan untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah;
e. Menumbuhkan sinergi antar aparat pengawasan.

Berdasarkan peraturan daerah kota bandung nomor 11 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi inspektorat kota bandung dalam pasal 4 menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi inspektorat kota bandung adalah:

1. Isnpektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektorat mempunyai fungsi:
   a. Perencanaan program pengawasan
   b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
   c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan
   d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan inspektorat.

4.1.1.2 Stuktur Organisasi Inspektorat kota Bandung

Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung :

a. Inspektur
b. Sekretariat, membawahkan :
   1. Sub Bagian Perencanaan
   2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Sub Bagian Administrasi dan Umum

c. Inspektur Pembantu Wilayah I :
   1. Seksi Pengawasan Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah I
   2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah I
   3. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan Bidang Kemasyarakatan Wilayah I

d. Inspektur Pembantu Wilayah II :
   1. Seksi Pengawasan Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah II
   2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah II
   3. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan Wilayah II

e. Inspektur Pembantu Wilayah III :
   1. Seksi Pengawasan Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah III
   2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah III
   3. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan Bidang Kemasyarakatan Wilayah III

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV :
   1. Seksi Pengawasan Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah IV
   2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah IV
   3. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV

g. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.1.3 Job Description Inspektorat kota Bandung

Berikut Tugas – tugas pokok masing - masing Jabatan berdasarkan Struktur Organisasi pada Inspektorat Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawsan dan pembinaan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyediakan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
    a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan
    b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan
    c. Pelaksanaa penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah
    d. Pelaksanaan penyusunan bahan / data pembinaan teknis fungsional
    e. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan
    f. Pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan
    g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat, dan

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan

3. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam bidang perencanaan. Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja pengawasan
   b. Penyiapan rancangan peraturan perundang – undangan
   c. Penyiapan rancangan peraturan perundang – undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan
   d. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan
   e. Penyusunan anggaran Inspektorat, dan
   f. Pelaporan kegiatan perencanaan
4. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam bidang evaluasi dan pelaporan. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
   b. Pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil pengawasan
   c. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan
   d. Peaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan
   e. Penyusunan statistik hasil pengawasan

f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan, dan
g. Pelaporan kegiatan evaluasi dan pelaporan

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang administrasi dan umum. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :
    a. Pelaksanaan pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumah tanggaan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas
    b. Pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai
    c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, dan
    d. Pelaporan kegiatan di bidang administrasi dan umum
6. Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di instansi / satuan kerja perangkat daerah sesuai wilayah kerja nya. Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :
    a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya
    b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawaasan di wilayah kerjanya
    c. Pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
    d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan, dan
    e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan

7. Seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Pembangunan sesuai wilayah kerja nya. Seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai fungsi :
    a. Pengusulan program Pengawasan bidang Pembangunan
    b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan
    c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan
    d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan, dan
    e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang pembangunan
8. Seksi Pengawasan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai wilayah kerja nya. Seksi Pengawasan Pemerintahan mempunyai fungsi :
    a. Pengusulan program pengawasan bidang pemerintahan
    b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan
    c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan
    d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang Pemerintahan

9. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kemasyarakatan sesuai wilayah kerja nya. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
    a. Pengusulan program pengawasan bidang kemasyarakatan
    b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan
    c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan
    d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan, dan
    e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang kemasyarakatan

10 . Kelompok Jabatan Fungsional pengaturan Tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat akan diatur setelah dibentuk, ditetapkan jenis dan jenjanganya oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

4.1.1.4 Aktivitas Inspektorat kota Bandung

Setiap Inspektur Pembantu yang dibantu oleh masing-masing Seksi Pengawasan sesuai bidang tugasnya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap instansi / satuan kerja perangkat daerah berdasarkan wilayah kerja. Wilayah sebagaimana dimaksud terdiri dari instansi / satuan kerja perangkat daerah yaitu :

a. Wilayah I, meliputi :

1 . Dinas Bina Marga dan Pengairan

2 . Dinas Perhubungan

3 . Dinas Kebakaran

4 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5 . Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

6 . Badan Kepegawaian Daerah

7 . Satuan Polisi Pamong Praja

8 . Rumah Sakit Umum Daerah

9 . Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat

10 . Bagian Pemerintahan Umum

11 . Bagian Keuangan

12 . Kecamatan Sukasari

13 . Kecamatan Sukajadi

14 . Kecamatan Cicendo

15 . Kecamatan Andir

16 . Kecamatan Cidadap

17 . Kecamatan Coblong

18 . Kecamatan Bandung Wetan

19 . Kecamatan Cibeunying Kaler

b. Wilayah II, meliputi :

1 . Asisten Pemerintahan

2 . Dinas Pendapatan

3 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4 . Dinas Pendidikan

5 . Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

6 . Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

7 . Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

8 . Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

9 . Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

10 . Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah

11 . Bagian Pengelolaan Aset

12 . Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

13 . Kecamatan Cibeunying Kidul

14 . Kecamatan Sumur Bandung

15 . Kecamatan Batununggal

16 . Kecamatan Regol

17 . Kecamatan Lengkong

18 . Kecamatan Kiaracondong

19 . Kecamatan Antapani

c. Wilayah III, meliputi :

1 . Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

2 . Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

3 . Dinas Sosial

4 . Dinas Kesehatan

5 . Dinas Pertanian

6 . Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7 . Badan Kesbang Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat

8 . Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

9 . Perusahaan Daerah Kebersihan

10 . Bagian Hukum dan HAM

11 . Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

12 . Bagian Umum dan Perlengkapan

13 . Kecamatan Bandung Kulon

14 . Kecamatan Bojongloa Kaler

15 . Kecamatan Babakan Ciparay

16 . Kecamatan Bojongloa Kidul

17 . Kecamatan Astanaanyar

18 . Kecamatan Bandung Kidul

19 . Kecamatan Buah batu

d. Wilayah IV, meliputi :

1 . Asisten Administrasi Umum

2 . Dinas Tenaga Kerja

3 . Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Perdagangan

4 . Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

5 . Dinas Pertamanan

6 . Badan Komunikasi dan Informatika

7 . Kantor Pengelolaan Pemakaman

8 . Perusahaan Daerah Air Minum

9 . Bagian Perekonomian

10 . Bagian Ketahanan Pangan

11 . Bagian Tata Usaha Pimpinan

12 . Kecamatan Rancasari

13 . Kecamatan Panyileukan

14 . Kecamatan Gede Bage

15 . Kecamatan Cibiru

16 . Kecamatan UjungBerung

17 . Kecamatan Mandalajati

18 . Kecamatan Cinambo

19 . Kecamatan Arcamanik

4.1.1.5 Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kota Bandung merupakan dinas daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang pengelolaan keuangan dan saet daerah kota bandung nomor 13 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah kota bandung nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah kota bandung.

1. Visi DKPAD

   Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana DKPAD Kota bandung harus diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi yang dirumuskan harus memberikan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan DPKAD

2. Misi DKPAD

   Misi sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh DPKAD, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh aparat DKPAD dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui keberadaan dan peran DPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan

4.1.1.6 Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan daerah kota bandung nomor 13 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah kota bandung nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah kota bandung, dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah terdiri atas:

a. Kepala dinas
b. Sekretariat

c. Bidang anggaran

d. Bidang perbendaharaan

e. Bidang pemberdayaan aset

f. Bidang akuntansi

4.2 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebanyak 80 responden yang masing-masing responden dibagi dua tempat penelitian yang mana setiap tempat penelitian terdiri dari 40 responden dua tempat penelitian yang bertempat di isnpektorat kota bandung dan dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bandung. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki - Laki	61	76.19%
Perempuan	19	23.81%
Total	80	100%

Berdasarkan Tabel 4.1

Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebesar 76.19%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 23.81% jadi dapat disimpulkan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria.

b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase %
<30 Tahun	28	9.52%
31 -40 Tahun	45	80.96%
41 -50 Tahun	7	9.52%
>50 Tahun	0	0%
Total	80	100%

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia <30 tahun berjumlah 28 orang atau sebesar 9.52%, 31- 40 tahun berjumlah 45 orang atau sebesar 80.96%, 41-50 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 9.52%, >50

tahun berjumlah 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-40 tahun.

c. Profil Pendidikan Terakhir Responden

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA atau Sederajat	0	0%
Diploma III	0	0%
Strata I (S1)	70	87.5%
Strata II (S2)	10	12.5%
Total	80	100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir

4.3 Analisis Deskriptif

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 80 orang responden. Untuk mendapatkan gambaran Aksesibilitas, Audit Kinerja Sektor Publik dan

Akuntabilitas Publik dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas ketiga variabel pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Audit Kinerja Sektor Publik, Indepedensi Auditor dan Akuntabilitas Publik

No	Variabel	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Aksesibilitas	1151	1600	71.9%	Baik
2.	Audit Kinerja Sektor Publik	1320	1600	82.5%	Baik
3.	Akuntabilitas Publik	2186	2800	78.1%	Baik
	Total	4657	6000	77.50%	Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Aksesibilitas, Audit Kinerja Sektor Publik dan Akuntabilitas Publik sudah baik. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai pelaksanaan Aksesibilitas, Audit Kinerja Sektor Publik dan Akuntabilitas Publik berdasarkan tiap variabel tersebut :

4.3.1 Analisis Deskriptif Aksesibilitas Pada Dinas Pemerintah Kota Bandung

Aksesinilitas pada Dinas Pemerintah Kota Bandung diukur menggunakan 3 indikator dan dioperasionalisasikan menggunakan 8 butir pernyataan, setiap butir pernyataan disertai dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri dari kuesioner negatif yang diberi bobot 1 sampai 5. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden mengenai Aksesibilitas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

a. Seluruh stakeholders memiliki akses terhadap laporan keuangan

Tabel 4.5
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Seluruh stakeholders memiliki akses terhadap laporan keuangan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Seluruh stakeholders memiliki akses terhadap laporan keuangan	F	5	5	8	60	42	489
		%	4,17	4,17	6,67	50	35	100%
	Pada setiap akhir tahun kegiatan para stakeholeder/pihak eksternal memilik akses terhadap laporan keuangan tahunan.	F	2	3	4	12	19	163
		%	5	7,5	10	30	47,5	100%
	Selain pihak eksternal atau stakeholder, masyarakat yang tidak terlibat pun memiliki akses terhadap laporan keuangan pemerintah	F	1	1	3	31	4	156
		%	2,5	2,5	7,5	77,5	10	100%
	Para stakeholder/pihak ekternal mendapat pemberitahuan untuk mengakses laporan keuangan	F	2	1	1	17	19	170
		%	5	2,5	2,5	42,5	47,5	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.5 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{489}{3x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{489}{600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 81{,}5\%$$

persentase total skor tanggapan responden atas indicator sebesar 81,5% bila merujuk pada table 4.5 termasuk katagori baik. Dilihat tanggapan responden mayoritas (19.5%) mengatakan prosedur pengumpulan dokumen –dokumen cukup susah didapat bila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada variable

aksesibilitas ini menandakan bahwa prosedur pengumpulan dokumen- dokumen laporan keuangan masih adanya kesulitan didapat.

b. Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses

Tabel 4.6
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
2	Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses	F	25	29	23	23	10	334
		%	20,83	24,17	19,17	27,5	8,33	100%
	media publikasi diperlukan dalam menyebarkan laporan keuangan	F	1	2	3	30	4	154
		%	2,5	5	7,5	75	10	100%
	Dalam pempublikasiannya perlukah pihak eksternal terlibat didalamnya	F	15	14	5	1	5	87
		%	37,5	35	12,5	2,5	12,5	100%
	Berhubungan langsung dengan pihak media dalam mempublikasikan laporan keuangan	F	9	13	15	2	1	93
		%	22,5	32,5	37,5	5	2,5	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{334}{3x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{334}{600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 55.67\%$$

persentase total skor tanggapan responden atas indicator sebesar 55.67% bila merujuk pada table 4.5 termasuk katagori cukup. Dilihat tanggapan

responden mayoritas (44.33%) mengatakan prosedur pengumpulan dokumen – dokumen cukup bila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada variable aksesibilitas ini menandakan bahwa prosedur pengumpulan dokumen- dokumen laporan keuangan masih adanya kesulitan didapat.

c. Ketersediaan informasi saat dibutuhkan

Tabel 4.7
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Seluruh stakeholders memiliki akses terhadap laporan keuangan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
3	Ketersediaan Informasi saat dibutuhkan	F	3	3	4	43	27	328
		%	2,5	2,5	3,33	35,83	20	100%
	Dalam kegiatannya ketersediaan laporan keuangan tahunan bagi stakeholder/pihak eksternal itu penting	F	1	1	2	19	17	163
		%	2,5	2,5	5	47,5	42,5	100%
	Dalam menunjang kemudahan informasi pemerintah menyediakan berbagai bentuk file demi menunjang ketersediaan informasi	F	2	2	2	24	10	156
		%	5	5	5	60	25	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{328}{2x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{328}{400} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 82\%$$

persentase total skor tanggapan responden atas indicator sebesar 82% bila merujuk pada table 4.7 termasuk katagori baik. Dilihat tanggapan responden mayoritas (18%) mengatakan prosedur pengumpulan dokumen –dokumen cukup rumit bila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada variable aksesibilitas ini menandakan bahwa prosedur pengumpulan dokumen- dokumen laporan keuangan masih adanya kesulitan didapat.

Tabel 4.8
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Indikator Aksesibilitas

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Seluruh stakeholders memiliki akses terhadap laporan keuangan	F	5	5	8	60	42	489
		%	4,17	4,17	6,67	50	35	100%
2	Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses	F	25	29	23	33	10	334
		%	20,83	24,17	19,17	27,5	8,33	100%
3	Ketersediaan informasi saat dibutuhkan	F	3	3	4	43	27	328
		%	2,5	2.5	3,33	35,83	20	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.8 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1151}{8x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1151}{1600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 71{,}9\%$$

persentase total skor tanggapan responden atas indicator sebesar 71,9% bila merujuk pada table 4.8 termasuk katagori baik. Dilihat tanggapan responden mayoritas (28.1%) mengatakan bahwa aksesibilitas pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bandung masih cukup sulit didapat. Dan dalam

fenomena yang didapat sebelumnya telah terjawab bahwa dalam pemerintah kota bandung terlaksananya aksesibilitas dengan baik dan hanya 28,1% yang menyatakan bahwa aksesibilitas dikota bandung sulit dilaksanakan dengan baik.

4.3.2 Analisis Deskriptif Audit Kinerja Pada Inspektorat Kota Bandung

Aksesinilitas pada Inspektorat Kota Bandung diukur menggunakan 3 indikator dan dioperasionalisasikan menggunakan 8 butir pernyataan, setiap butir pernyataan disertai dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri dari kuesioner negatif yang diberi bobot 1 sampai 5. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden mengenai Audit kinerja pada Inspektorat Kota Bandung berdasarkan indikator.

a. Tahap Perencanaan atau survey terlebih dahulu

Tabel 4.9
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Tahap Perencanaan atau survey terlebih dahulu

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Tahap perencanaan atau survey terlebih dahulu	F	0	3	8	59	50	516
		%	0	2,5	6,67	49,17	41,67	100%
	Pemahaman entitas membantu mencegah dihasilkannya temuan yang menyesatkan (misleading)	F	0	0	3	19	18	175
		%	0	0	7,5	47,5	45	100%
	Pemilihan area kunci yang tepat menungkinkan penggunaan sumber daya audit secara lebih efisien dan efektif	F	0	0	3	30	7	164

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
		%	0	0	7,5	75	17,5	100%
	Pada audit kinerja, criteria hasil berkaitan dengan tercapainya ekonomi, efisiensi dan efektivitas audit yang dilakukan	F	0	3	2	10	25	177
		%	0	7,5	5	25	62,5	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.9 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{516}{3x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{516}{600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 86\%$$

persentase total skor tanggapan responden atas indicator sebesar 86% bila merujuk pada table 4.9 termasuk katagori sangat baik. Dilihat tanggapan responden mayoritas (14%) mengatakan prosedur pengumpulan dokumen – dokumen cukup rumit bila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada variable audit kinerja ini menandakan bahwa prosedur pengumpulan dokumen- dokumen pengauditan masih rumit yang mengakibatkan pelaksanaan audit berjalan dengan lambat.

b. Tahap pelaksanaan atau pengujian terinci

Tabel 4.10
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Tahap pelaksanaan atau pengujian terinci

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
2	Tahap pelaksanaan atau pengujian terinci	F	0	2	10	46	63	530
		%	0	1,67	8,33	38,33	52.5	100%
	Bukti-bukti audit harus mendapat perhatian auditor sejak tahap perencanaan audit sampai dengan akhir proses audit	F	0	2	3	7	28	181
		%	0	5	7,5	17,5	70	100%
	Kertas kerja audit(kka) merupakan penghubung antara pelaksanaan dan pelaporan audit	F	0	0	3	25	13	171
		%	0	0	7,5	62,5	32,5	100%
	Tujuan pelaporan audit adalah menyediakan informasi, rekomendasi, dan penilaian yang independen mengenai kegiatan entitas yang diaudit	F	0	0	4	14	22	178
		%	0	0	10	35	55	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{352}{2x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{352}{400} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 88\%$$

persentase total skor tanggapan responden atas indicator sebesar 88% bila merujuk pada table 4.10 termasuk katagori sangat baik. Dilihat tanggapan

responden mayoritas (12%) mengatakan prosedur pengumpulan dokumen – dokumen cukup rumit bila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada variable audit kinerja sektor public ini menandakan bahwa prosedur pengumpulan dokumen- dokumen pengauditan masih rumit yang mengakibatkan pelaksanaan audit berjalan dengan lambat.

c. Tahap tindak lanjut

Tabel 4.11
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Tahap tindak lanjut

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
3	Tahap tindak lanjut	F	9	16	11	24	19	274
		%	11,25	20	13,75	30	23,75	100%
	Tujuan tindak lanjut audit kinerja yaitu memperoleh bukti yang cukup untuk memberikan keyakina yang memadai bahwa auditee telah melaksanakan action plannya	F	1	1	2	19	17	177
		%	2,5	2,5	5	42,5	47,5	100%
	Auditor berkewajiban memonitor pelaksanaa tindak lanjut terhadap rekomendasi audit yang telah disampaikannya pada auditee	F	8	16	9	5	2	97
		%	20	45	22,5	12,5	5	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.11 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{355}{2x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{355}{400} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 88{,}75\%$$

persentase total skor tanggapan responden atas indicator sebesar 88,25% bila merujuk pada table 4.11 termasuk katagori sangat baik. Dilihat tanggapan responden mayoritas (11,25%) mengatakan prosedur pengumpulan dokumen –dokumen cukup rumit bila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada variable audit kinerja sektor public ini menandakan bahwa prosedur pengumpulan dokumen- dokumen pengauditan masih rumit yang mengakibatkan pelaksanaan audit berjalan dengan lambat.

Tabel 4.12
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Indikator Audit kinerja

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Tahap perencanaan atau survey terlebih dahulu	F	0	3	8	59	50	516
		%	0	2,5	6,67	49,17	41,67	100%
2	Tahap pelaksanaan atau pengujian terinci	F	0	2	10	46	63	530
		%	0	1,67	8,33	38,33	52,5	100%
3	Tahap tindak lanjut	F	9	16	11	24	19	274
		%	11,25	20	13,75	30	23,75	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.12 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1320}{8x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1320}{1600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 82,5\%$$

persentase total skor tanggapan responden atas indicator sebesar 82,5% bila merujuk pada table 4.12 termasuk katagori sbaik. Dilihat tanggapan

responden mayoritas (17,5%) mengatakan prosedur pengumpulan dokumen – dokumen cukup rumit bila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada variable audit kinerja ini menandakan bahwa prosedur pengumpulan dokumen- dokumen pengauditan masih rumit yang mengakibatkan pelaksanaan audit berjalan dengan lambat. Dalam fenomena yang sempat dibahas diawal bab bahwa telah terjawab sudah bahwa kelemahan inherent dan struktural saudah dibenahi dalam kegiatannya saat ini yang menghasilkan katogeri baik pada hasilnya dan 17,5% menyatakan bahwa kelemahan inherent dan struktural masih terjadi pada pelaksanaan audit kinerja tersebut.

4.3.3 Analisis Deskriptif Akuntabilitas Pada Inspektorat Kota Bandung

Aksesinilitas pada Inspektorat Kota Bandung diukur menggunakan 5 indikator dan dioperasionalisasikan menggunakan 14 butir pernyataan, setiap butir pernyataan disertai dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri dari kuesioner negatif yang diberi bobot 1 sampai 5. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden mengenai Akuntabilitas pada Inspektorat Kota Bandung berdasarkan indikator.

a. Akuntabilitas terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

Tabel 4.13
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Akuntabilitas terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan	F	1	3	8	37	71	534
		%	0,83	2,5	6,67	30,83	59,17	100%
	Dalam melaksanakn tugas penyelnggra pelayanan sesuai	F	1	1	3	12	23	175

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
	peraturan & patuh terhadap hukum	%	2,5	2,5	7,5	30	57,5	100%
	Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi	F	0	1	3	4	32	187
		%	0	2,5	7,5	10	80	100%
	Setiap instansi pemerintah harus mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara	F	0	1	2	21	16	172
		%	0	2,5	5	52,5	40	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.13 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{534}{3x5x40} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{534}{600} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 89\%$$

persentase total skor tanggapan responden atas indicator sebesar 89% bila merujuk pada table 4.13 termasuk katagori sangat baik. Dilihat tanggapan responden mayoritas (11%) mengatakan akuntabilitas terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan sudah dilakukan dengan baik oleh entitas publik.

b. Akuntabilitas terhadap jabatan yang diemban

Tabel 4.14
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas terhadap jabatan yang diemban

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
2	Akuntabilitas terhadap jabatan yang diemban	F	8	16	16	42	39	448
		%	6,67	13,33	13,33	35	32.5	100%
	Selalu menghindar dari praktek-praktek penyalahgunaan jabatan *(abuse for power)*	F	0	1	2	19	18	174
		%	0	2,5	5	47,5	45	100%
	Dalam melaksanakan tugas para pegawai memahami secara jelas mengenai Hak dan kewajiabnnya	F	8	14	11	6	1	98
		%	20	35	27,5	15	2,5	100%
	Kemampuan mempertanggung jawabkan (akuntabilitas) pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik	F	0	1	2	17	20	176
		%	0	2,5	5	42,5	50	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.14 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{448}{3x5x40} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{448}{600} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 74.67\%$$

persentase total skor tanggapan responden atas indicator sebesar 74,67 bila merujuk pada table 4.14 termasuk katagori baik. Dilihat tanggapan responden mayoritas (25.33%) mengatakan akuntabilitas terhadap jabatan yang diemban masih baik dilakukan oleh sebuah entitas public.

c. Akuntabilitas terhadap prosedur, proses dan pelaksanaan kegiatan

Tabel 4.15
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas terhadap prosedur, proses dan pelaksanaan kegiatan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
3	Akuntabilitas terhadap prosedur, proses dan pelaksanaan kegiatan	F	11	16	16	42	35	434
		%	9,17	13,33	13,33	35	29,17	100%
	Dalam keadaan terdesak, diperbolehkan adanya kelambanan pelayan	F	11	15	10	4	0	87
		%	27,5	37,5	25	10	0	100%
	Pemberian pelayanan dilakukan secara cepat responsif dan murah biaya	F	0	0	3	23	14	171
		%	0	0	7,5	57,5	35	100%
	Dalam memberikan pelayanan adanya tindakan mark up / pungutan lain di luar yg telah di tetapkan	F	0	1	3	15	21	176
		%	0	2,5	7,5	37,5	52,5	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.15 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{434}{3x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{434}{600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 72.34\%$$

persentase total skor tanggapan responden atas indicator sebesar 72.34% bila merujuk pada table 4.15 termasuk katagori baik. Dilihat tanggapan responden mayoritas (27.66%) mengatakan prosedur akuntabilitas prosedur, proses, dan pelaksanaan kegiatan masih dapat dipenuhi oleh entitas publik saat ini.

d. Akuntabilitas program kegiatan

Tabel 4.16
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas program kegiatan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
4	Akuntabilitas program kegiatan	F	0	2	13	58	48	512
		%	0	1,67	10,83	48,33	40	100%
	Tujuan dari program yg ditetapkan bisa tercapai	F	0	1	2	23	14	170
		%	0	2,5	5	57,5	35	100%
	Program yg di tetapkan mengacu pada aspek ekonomis yaitu memebrikan hasil optimal dgn biaya minimal	F	0	0	5	18	17	172
		%	0	0	12,5	45	42,5	100%
	Sistem dan prosedur yang digunakan dalam pengelolaan program-program untuk publik harus dilakukan secara transparan	F	0	1	5	17	17	170
		%	0	2,5	12,5	42,5	42,5	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.16 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{512}{3x5x40} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{512}{600} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 85.34\%$$

persentase total skor tanggapan responden atas indicator sebesar 85.34% bila merujuk pada table 4.16 termasuk katagori sangat baik. Dilihat tanggapan responden mayoritas (14.66%) mengatakan akuntabilitas program kegiatan dapat dipenuhi oleh entitas publik.

e. Akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang telah dibuat

Tabel 4.17
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas terhadap prosedur, proses dan pelaksanaan kegiatan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
5	Akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang telah dibuat	F	10	19	12	21	18	258
		%	12,5	23.75	15	26,25	22,5	100%
	Kebijakan yg telah di terapkan dpt dipertanggung jawabkan scara vertikal (DPR/DPRD)	F	0	0	4	18	18	174
		%	0	0	10	45	45	100%
	Kebijakan yg telah diterapkan dpt dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (horizontal)	F	10	19	8	3	0	84
		%	25	47,5	20	7,5	0	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.17 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{258}{2x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{258}{400} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 64.5\%$$

persentase total skor tanggapan responden atas indicator sebesar 64.5% bila merujuk pada table 4.17 termasuk katagori cukup. .tetapi masih terdapat beberapa responden yang menjawab bahwa Pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi,efisien,efektif para reponden menjawab cukup ekonomis, efektiv, dan efisien. Ini menandakan

bahwa belum semua entitas public menjalankan akuntabilitas secara optimal.sedangkan dari sisi. Pertanggung jawaban lembaga- lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja (45.5%) menjawab sangat dibutuhkan yang menunjukan akuntabilitas lembaga public diperlukan pembuatan laporan kuangan .

Tabel 4.18
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Indikator Akuntabilitas

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Akuntabilitas terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan	F	1	3	8	37	71	534
		%	2,5	2,5	7,5	30	57,5	100%
2	Akuntabilitas terhadap jabatan yang diemban	F	8	16	16	42	39	448
		%	0	2,5	5	47,5	45	100%
3	Akuntabilitas terhadap prosedur, proses dan pelaksanaan kegiatan	F	11	16	16	42	35	434
		%	9,17	13,33	13,33	35	29,17	100%
4	Akuntabilitas program kegiatan	F	0	2	13	58	48	512
		%	0	1,67	10,83	48,33	40	100%
5	Akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang telah dibuat	F	10	19	12	21	18	258
		%	12,5	23,75	15	26,25	22,5	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.18 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{2186}{14x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{2186}{2800} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 78{,}1\%$$

persentase total skor tanggapan responden atas indicator sebesar 78,1% bila merujuk pada table 4.18 termasuk katagori baik. Dilihat tanggapan responden mayoritas (21,9%) mengatakan akuntabilitas masih cukup rumit untuk mencapainya pada entitas publik. Dalam fenomena yang telah dibahas sebelumnya pada bab awal bahwa akuntabilitas saat ini sangat dibutuhkan pada pelaksanaannya baik dipemerintah daerah maupun pusat dan hasil yang didapatkan masuk dalam kategori baik pada hasil tanggapan dari responden. Dan hasil sebesar 21,9% menyatakan bahwa akuntabilitas saat ini belum terlaksana dengan baik apa adanya.

4.4 Analisis Verivikatif

Pada bagian ini akan diuji pengaruh aksesibilitas dan audit kinerja terhadap akuntabilitas survey pada inspektorat kota bandung dan dina pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bandung menggunakan regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam analisis regresi pada penelitian ini berdsarkan data 80 responden yang terdiri dari 2 tempat survey. Karena skor jawaban responden masih bentuk skala pengukuran ordinal, maka agar dapat diolah menggunakan analisis regresi linear terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi skala interval melalui *method of seccesive interval*.

4.4.1 Hasil Analisis Regresi

Dalam penelitian ini akan dilihat pengaruh Aksesibilitas dan Audit kinerja terhadap Akuntabilitas. Pada model regresi yang digunakan variabel Aksesibilitas dan Audit kinerja merupakan variabel bebas (X) dan variabel tidak bebas (Y)

adalah Akuntabilitas. Hasil perhitungan perhitungan koefisien regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 18 for windows berdasarkan data penelitian adalah berikut :

Tabel 4.19

Hasil Perhitungan Koefisien Regresi X terhadap Y

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.262	.336		.780	.441
	x1 (aksesibilitas)	.406	.118	.469	3.427	.002
	X2 (audit kinerja)	.534	.173	.422	3.079	.004

a. Dependent Variable: y (akuntabilitas)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Diperoleh persamaan regresi taksiran untuk melihat pengaruh Aksesibilitas dan Audit kinerja terhadap Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

$\hat{Y} = 0{,}262 + 0{,}406\ X_1 + 0{,}534\ X_2$

Persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai konstanta pada persamaan sebesar 0,262 menjelaskan nilai rata-rata Akuntabilitas pada saat Aksesibilitas dan Audit kinerja konstan (tidak berubah) atau sama dengan nol adalah sebesar 0,262.
2. Koefisien regresi untuk Aksesibilitas (X_1) bertanda positif sebesar 0,406 menunjukkan perubahan Akuntabilitas (Y) jika Aksesibilitas meningkat sebesar satu satuan. Jadi jika skor Aksesibilitas meningkat sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan Akuntabilitas sebesar 0,406. Jadi semakin tinggi aksesibilitas maka Akuntabilitas semakin baik.

3. Koefisien regresi untuk Audit kinerja (X_2) bertanda positif sebesar 0,534 menunjukkan perubahan Akuntabilitas (Y) jika Audit kinerja meningkat sebesar satu satuan. Jadi jika skor Audit kinerja meningkat sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan Akuntabilitas sebesar 0,534. Jadi semakin tinggi Audit kinerja maka Akuntabilitas semakin baik.

4.4.2 Pengujian Asumsi Regresi

4.4.2.1 Uji Normalitas Residu

Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil perhitungan uji normalitas residual dari persamaan taksiran yang diperoleh menggunakan SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

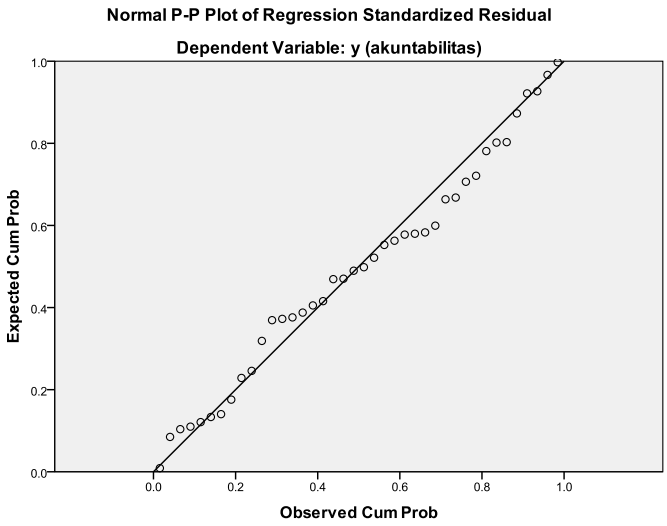
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.30646205
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.098
	Negative	-.091
Kolmogorov-Smirnov Z		.620
Asymp. Sig. (2-tailed)		.837

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai D_{hitung} = 0,118 dengan p-value (nilai sig) sebesar 0,479. Hasil pengujian normalitas model regresi menunjukkan bahwa nilai residual dari model berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan normalitas menunjukan nilai probabilitas (sig.) *Kolmogorov-*

Smirnov Test yang diperoleh untuk nilai residual sebesar 0,479 lebih besar dari 0,05.

Untuk mengetahui normalitas hasil regresi yang diperoleh dapat dilhat dari normal plot. Hasil PP plot untuk uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut. Terlihat data menyebar disekitar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual hasi taksiran regresi memenuhi asumsi berdistribusi normal.



Gambar 4.1
Grafik PPPlot dari Hasil Pengujian Normalitas

4.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factors*). Nilai VIF yang kecil menunjukkan tidak adanya korelasi yang tinggi (sempurna) antar variabel X dalam model regresi. Batasan nilai untuk variabel dikatakan berkolinieritas tinggi jika diperoleh nilai VIF untuk variabel bebas lebih besar dari 10.

Tabel 4.21
Hasil Perhitungan VIF

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	x1 (aksesibilitas)	.441	2.269
	X2 (audit kinerja)	.441	2.269

a. Dependent Variable: y (akuntabilitas)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Hasil perhitungan nilai VIF untuk variabel bebas dalam model regresi dalam penelitian ini menunjukkan angka yang lebih besar dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi kolinearitas yang tinggi antara variabel bebas dalam persamaan regresi yang diperoleh.

4.4.2.3 Uji Asumsi Bebas Heterokedastisitas

Hasil pengujian dengan menggunakan pendekatan korelasi spearman antara nilai residual dengan variabel bebas (X1 dan X2) diberikan pada tabel berikut :

Tabel 4.22
Hasil Korelasi Rank Spearman untuk Uji Heteroskedastisitas

Correlations[a]

			ABSR	x1 (aksesibilitas)	X2 (audit kinerja)
Spearman's rho	ABSR	Correlation Coefficient	1.000	.000	.069
		Sig. (2-tailed)	.	.999	.672
	x1 (aksesibilitas)	Correlation Coefficient	.000	1.000	.732**
		Sig. (2-tailed)	.999	.	.000
	X2 (audit kinerja)	Correlation Coefficient	.069	.732**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.672	.000	.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

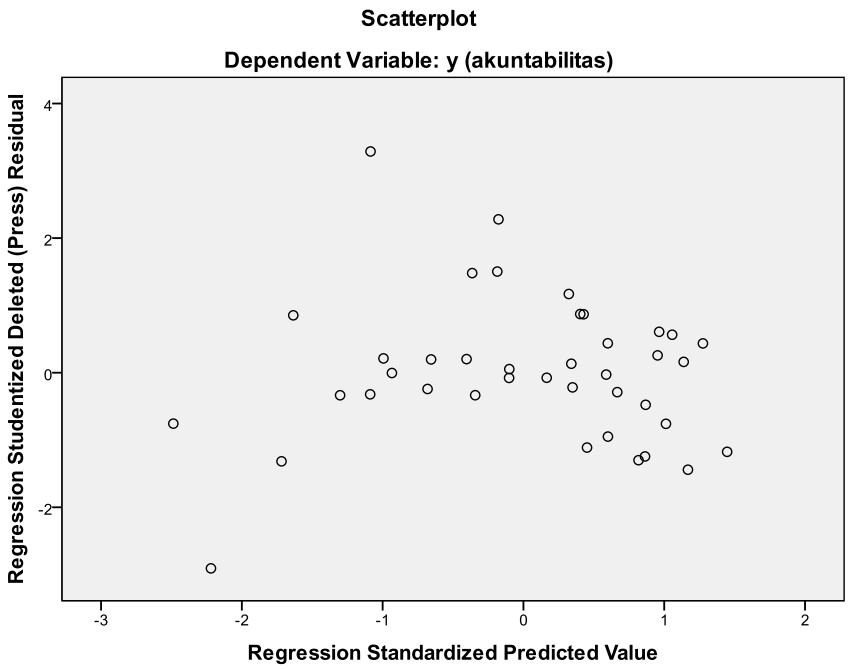
a. Listwise N = 40

Sumber : Lampiran Output SPSS

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari residual homogen (tidak terdapat heteroskedastisitas). Hal ini ditunjukan oleh

hasil korelasi variabel X_1 dan X_2 dengan nilai absolut dari residual (error) tidak signifikan pada level 5%. Diperoleh nilai signifikansi untuk X_1 sebesar 0,999 dan untuk X_2 sebesar 0,672 (nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sebagai batas tingkat kekeliruan).

Untuk mengetahui hasil Heteroskedastisitas dapat juga dilakukan dengan melihat grafik Scetter plot nilai residual. Hasil plot yang diperoleh dari SPSS dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 4.2
Grafik Scatter Plot dari Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Pada grafik scatterplot diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal inimerupakan indikasi bahwa varian residu hasil persamaan regresi yang diperoleh homogen dan dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastistas dalam persamaan regresi yang diperoleh.

4.4.3 Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan, Audit Kinerja dan Akuntabilitas Pada Insepktorat kota Bandung dan Dinas pengelolaan Keuangan kota Bandung

Hasil perhitungan korelasi menggunakan *SPSS 17 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.23
Hasil Korelasi

Correlations[a]

		x1 (aksesibilitas)	X2 (audit kinerja)	y (akuntabilitas)
x1 (aksesibilitas)	Pearson Correlation	1	.748**	.785**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
X2 (audit kinerja)	Pearson Correlation	.748**	1	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
y (akuntabilitas)	Pearson Correlation	.785**	.773**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
a. Listwise N=40

Diperoleh hasil perhitungan korelasi Aksesibilitas dan Akuntabilitas yaitu 0,785. Hasil perhitungan nilai korelasi Audit kinerja dan Akuntabilitas yaitu 0,773. Hasil perhitungan korelasi Aksesibilitas dan Audit kinerja yaitu 0,748.

Untuk mengetahui korelasi secara parsial dari Aksesibilitas dan Audit kinerja secara parsial dengan Akuntabilitas dihitung korelasi parsial.

1. Hubungan Aksesibilitas dengan Akuntabilitas pada saat Audit kinerja Konstan

Tabel 4.24
Hasil Korelasi Parsial Aksesibilitas
dengan Akuntabilitas pada saat Audit kinerja Konstan

Correlations

Control Variables			x1 (aksesibilitas)	y (akuntabilitas)
X2 (audit kinerja)	x1 (aksesibilitas)	Correlation	1.000	.491
		Significance (2-tailed)	.	.002
		Df	0	37
	y (akuntabilitas)	Correlation	.491	1.000
		Significance (2-tailed)	.002	.
		Df	37	0

Nilai korelasi yang diperoleh antara Aksesibilitas dengan Akuntabilitas pada saat Audit kinerja konstan sebesar 0,491. Artinya hubungan antara aksesibilitas dengan akuntabilitas termasuk dalam kategori sedang ketika audit kinerja tidak mengalami perubahan/konstan. Ini menggambarkan aksesibilitas laporan keuangan semakin baik, sementara audit kinerja tidak berubah maka akan meningkatkan akuntabilitas publik pada pemerintah kota bandung.

2. Pengaruh Audit kinerja Terhadap Akuntabilitas pada saat Aksesibilitas Konstan

Tabel 4.25
Hasil Korelasi Parsial Audit kinerja
dengan Akuntabilitas pada saat Aksesibilitas konstan

Correlations

Control Variables			X2 (audit kinerja)	y (akuntabilitas)
x1 (aksesibilitas)	X2 (audit kinerja)	Correlation	1.000	.452
		Significance (2-tailed)	.	.004
		Df	0	37
	y (akuntabilitas)	Correlation	.452	1.000
		Significance (2-tailed)	.004	.
		Df	37	0

Nilai korelasi yang diperoleh antara Audit kinerja dengan Akuntabilitas pada saat Aksesibilitas konstan sebesar 0,452 . Artinya hubungan antara audit kinerja dengan akuntabilitas publik termasuk kategori sedang ketika aksesibilitas

laporan keuangan tidak mengalami perubahan/konstan. Ini menggambarkan bahwa ketika audit kinerja semakin baik, sementara aksesibilitas laporan keuangan tidak berubah maka akan meningkatkan akuntabilitas publik pada pemerintah kota bandung.

Analisis Korelasi Ganda

Untuk mengetahui korelasi ganda dan besarnya pengaruh secara bersama-sama Aksesibilitas dan Audit kinerja terhadap Akuntabilitas dapat dilihat nilai korelasi dan koefisien determinasi (R^2). Tabel berikut merupakan hasil perhitungan koefisien determinasi untuk persamaan regresi yang diperoleh dengan *SPSS 17 for windows* sebagai berikut :

Tabel 4.26
Tabel Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.833[a]	.694	.678	.31464

a. Predictors: (Constant), X2 (audit kinerja), x1 (aksesibilitas)
b. Dependent Variable: y (akuntabilitas)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Diperoleh besarnya korelasi ganda antara Aksesibilitas dan Audit kinerja dengan Akuntabilitas sebesar 0,833.

Nilai R-*square* (R^2) atau koefisien determinasi sebesar 0,694 pada kolom ketiga pada tabel di atas menunjukkan besarnya pengaruh Aksesibilitas dan Audit kinerja terhadap Akuntabilitas. Artinya 69,4% perubahan Akuntabilitas dipengaruhi (dapat dijelaskan) oleh Aksesibilitas dan Audit kinerja sedangkan 30,6% lainnya dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

4.4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas menggunakan uji F dan pada tahap kedua dilakukan uji secara parsial untuk melihat kebermaknaan masing-masing variabel bebas dalam model regresis yang diperoleh menggunakan uji t.

4.4.4.1 Pengujian Koefisien Regresi secara Simultan

Uji F digunakan untuk pengujian koefisien regresi secara keseluruhan untuk mengetahui keberartian hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

Ho_1 : Aksesibilitas dan audit kinerja tidak berpengaruh terhadap keuangan efektivitas pengelolaan daerah

$\beta_1 = \beta_2 = 0$

Ha_1 : Aksesibilitas dan audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas

Ada $\beta_i \neq 0$

Untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya dilakukan dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan nilai F_{tabel}. Dari tabel F diperoleh nilai F_{tabel} dengan $db_1 = 2$ dan $db_2 = 40\text{-}2\text{-}1 = 37$ sebesar 3,252.

Nilai statistik uji F diperoleh dalam tabel Anova hasil SPSS pada tabel berikut:

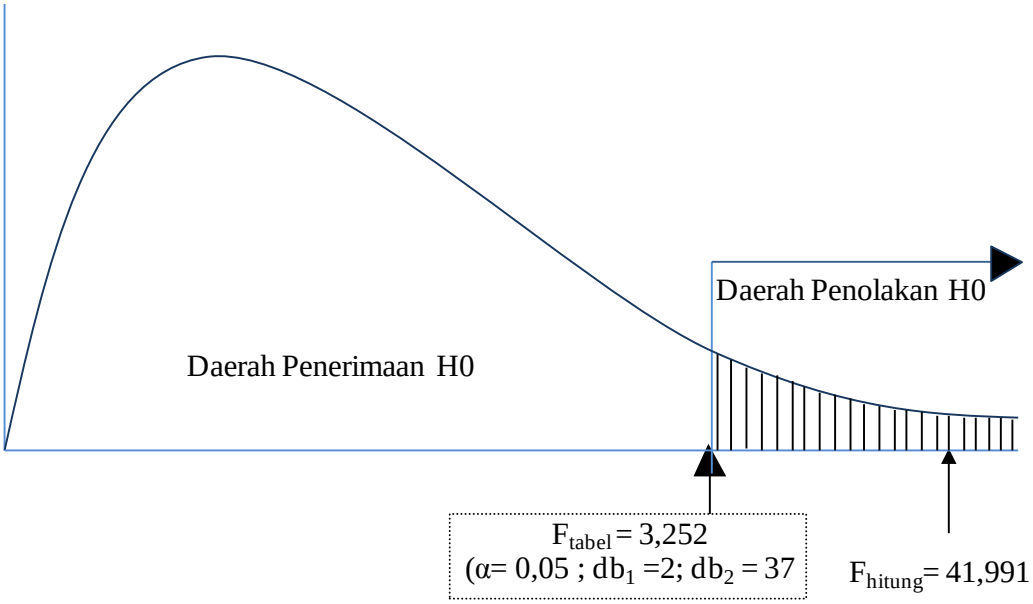
Tabel 4.27
Hasil Uji Simultan
ANOVAb

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.314	2	4.157	41.991	.000[a]
	Residual	3.663	37	.099		
	Total	11.977	39			

a. Predictors: (Constant), X2 (audit kinerja), x1 (aksesibilitas)
b. Dependent Variable: y (akuntabilitas)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Diperoleh nilai F hitung sebesar 41,991 dengan signifikansi 0,000. Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis pada pengujian simultan dapat digambarkan dalam diagram daerah penerimaan dan penolakan Ho sebagai berikut:



Gambar 4.3
Daerah Penerimaan Dan Penolakan Ho Pada Pengujian Simultan

Diperoleh F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} (41,991> 3,252). Dengan demikian, hasil uji menunjukkan menolak Ho. Jadi hasil pengujian statistik secara

simultan adalah tidak signifikan. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,000) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05), yang berarti kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas signifikan sangat kecil atau lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5% (α = 0,05).

Artinya Aksesibilitas dan Audit kinerja secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas.

4.4.4.2 Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan secara parsial dilakukan pengujian koefisien regresi dengan menggunakan statistik Uji t. Penentuan hasil pengujian (penerimaan/ penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Nilai t_{tabel} dengan taraf kesalahan 5% dan db = n–k–1 = 40-2-1= 37 adalah 2,026.

a. Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Secara Parsial

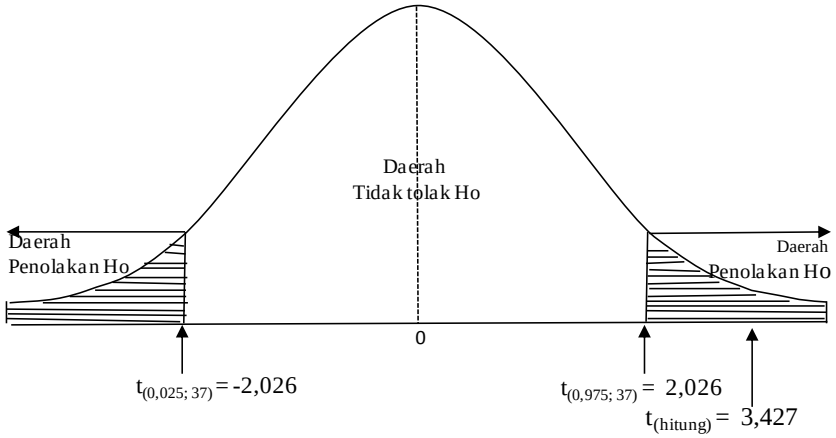
Untuk melihat pengaruh Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas, hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_{02} :$\beta_1 = 0$ Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas

Ha_2 : $\beta_1 \neq 0$ Aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas

Hasil perhitungan nilai t-hitung untuk variabel Aksesibilitas (X_1) diperoleh sebesar 3,427 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,002.

Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis (hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}) pada pengujian parsial dapat digambarkan dalam diagram daerah penerimaan dan penolakan H_0 sebagai berikut :



Gambar 4.4
Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Parsial X_1 terhadap Y

Diperoleh nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (t_{hitung} = 3,427 > t_{tabel} = 2,026). Keputusan uji adalah menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,002) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05. Artinya kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas signifikan sangat kecil atau lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5% (α = 0,05) sehingga keputusan uji adalah menolak H0.

Hasil pengujian dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% bahwa Aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas.

b. Pengaruh Audit kinerja Terhadap Akuntabilitas Secara Parsial

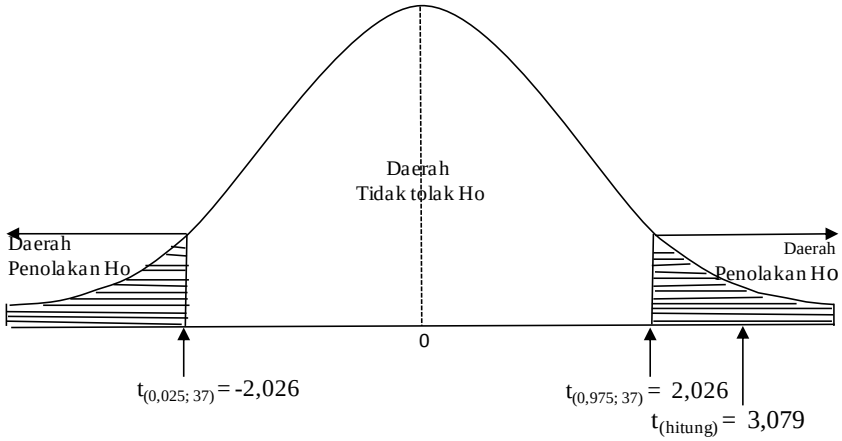
Untuk melihat pengaruh Audit kinerja terhadap Akuntabilitas, hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_{03} :$\beta_2 = 0$ Tidak terdapat pengaruh dari Audit kinerja terhdap Akuntabilitas

Ha_3 : $\beta_2 \neq 0$ Terdapat pengaruh dari Audit kinerja terhdap Akuntabilitas

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Audit kinerja (X_2) sebesar 3,079 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,004.

Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis (hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}) pada pengujian parsial dapat digambarkan dalam diagram daerah penerimaan dan penolakan H_0 sebagai berikut :



Gambar 4.5
Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Parsial X_2terhadap Y

Diperoleh nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (t_{hitung} = 3,079 > t_{tabel} = 2,026). Keputusan uji adalah menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,000) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05. Artinya kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh Audit kinerja terhadap Akuntabilitas signifikan sangat kecil atau lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5% (α = 0,05) sehingga keputusan uji adalah menolak H0.

Hasil pengujian dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% bahwa Audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas